

## **ABSTRAK**

Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang muncul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh yang bersangkutan. Perjanjian kerja digunakan sebagai dasar adanya hubungan kerja. Perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha menimbulkan hubungan hukum yang disebut hubungan kerja mengandung 3 ciri, yaitu adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Pemerintah/pemerintah daerah dalam penetapan standar upah minimum seringkali berpihak kepada pengusaha, pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Upah minimum dalam peraturan pemerintah diharapkan adanya penyesuaian nilai upah minimum setiap tahunnya, karena adanya data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bagaimana kedudukan hukum pekerja harian, serta apakah pelaksanaan pemberian pengupahan sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di PT Putraduta Buanasentosa.

Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan proses pengumpulan datanya melalui proses wawancara dan studi Pustaka melalui buku dan perundang-undangan terkait kemudian dianalisa secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pekerja harian sebagai PKWT dan pekerja tetap sebagai PKWTT terdapat kesenjangan dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang sama. Dan juga dalam pelaksanaan pengupahannya, PT Putraduta Buanasentosa (IndoArsip) tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum (UMK) bagi pekerja harian, meskipun IndoArsip bukanlah perusahaan yang perlu dikecualikan dalam hal pemberian upahnya kepada pekerja harian karena bukan merupakan usaha mikro.

Kata Kunci : Pekerja harian – perjanjian kerja – upah minimum

## **ABSTRACT**

An employment relationship is a relationship that arises between a worker and an employer after a prior agreement is entered into by the person concerned. An employment agreement is used as the basis for an employment relationship. The labor agreement between workers and employers gives rise to a legal relationship called Labor Relations containing 3 characteristics, namely the existence of work, orders, and wages. The Government / Local Government in setting the minimum wage standard is often in favor of employers, the government continues to strive to maintain economic stability and continue to encourage high and sustainable economic growth. The minimum wage in the government regulation is expected to adjust the value of the minimum wage every year, because the data on economic growth, inflation, purchasing power parity, employment rate, and median wages are sourced from authorized institutions in the field of Statistics. Therefore, this study was conducted to explain how the legal position of daily workers, as well as whether the implementation of wage provision is in accordance with the Labor Law at PT Putraduta Buanasentosa.

The research method used is juridical empirical. The approach used is the sociology of law approach with the process of collecting data through the interview process and literature through books and related legislation and then analyzed descriptively.

The results of this study showed that the position of daily workers as workers of a certain time and permanent workers as workers of indefinite time there is a gap and the absence of fulfillment of the same rights and obligations. And also in the implementation of wages, PT Putraduta Buanasentosa (IndoArsip) is not in accordance with the provisions of the minimum wage (District minimum wage) for daily workers, although IndoArsip is not a company that needs to be excluded in terms of giving wages to daily workers because it is not a micro-enterprise.

**Keywords:** Daily Worker-employment agreement-minimum wage